



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN -PT NO: 451 / SK / BAN-PT / AKRED / S / XI / 2014*

**Perbandingan Kebijakan Benigno Aquino III dan  
Rodrigo Duterte dalam Menangani Isu Tiongkok dan  
Laut Tiongkok Selatan**

Skripsi

Oleh

Dominico Savio Nugroho Agung Pratama

2012330200

Bandung

2019



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN -PT NO: 451 / SK / BAN-PT / AKRED / S / XI / 2014*

**Perbandingan Kebijakan Benigno Aquino III dan  
Rodrigo Duterte dalam Menangani Isu Tiongkok dan  
Laut Tiongkok Selatan**

Skripsi

Oleh

Dominico Savio Nugroho Agung Pratama

2012330200

Pembimbing

Idil Syawfi, S.IP., M.Si

Bandung

2019

Universitas Katolik Parahyangan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama: Dominico Savio Nugroho Agung Pratama

NPM: 2012330200

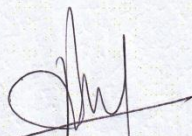
Judul: Perbandingan Kebijakan antara Benigno Aquino III dan Rodrigo Duterte dalam Menangani Isu Tiongkok dan Laut Tiongkok Selatan

Telah diuji dalam Sidang Jejang Sarjana  
Pada Kamis, 1 Agustus 2019  
Dan dinyatakan **LULUS**.

**Tim Penguji**

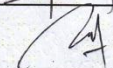
**Ketua Sidang merangkap anggota**

Dr. I Nyoman Sudira

: 

**Sekretaris merangkap pembimbing**

Idil Syawfi, S.IP., M.Si.

: 

**Anggota**

Adrianus Harsawaskita, S.IP.,MA.

: 

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo

### **Pernyataan**

Untuk baiknya ilmu dan kepercayaan saya, dibawah ini saya menyatakan :

Nama : Dominico Savio Nugroho Agung Pratama

NPM : 2012330200

Jurusan : Hubungan Internasional

Judul : Perbandingan Kebijakan antara Benigno Aquino III dan Rodrigo

Duterte dalam Menangani Isu Tiongkok dan Laut Tiongkok Selatan

Bahwa penelitian ini adalah hasil penelitian saya sendiri, dan bukan karya tulis ilmiah hasil orang lain yang pernah diajukan guna memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab, dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak sesuai atau tidak benar.

Bandung, 14 Agustus 2019



Dominico Savio Nugroho Agung Pratama

## Abstrak

Nama : Dominico Savio Nugroho Agung Pratama

NPM : 2012330200

Judul : Perbandingan Kebijakan Benigno Aquino III dan Rodrigo Duterte dalam Menangani Isu Tiongkok dan Laut Tiongkok Selatan

---

Negara merupakan aktor paling utama dan paling tinggi dalam menentukan sebuah keputusan atau sebuah kebijakan. Dalam menyusun sebuah kebijakan, seorang aktor, dalam hal ini pemimpin negara atau presiden, perlu mengadakan pertimbangan yang matang demi menyokong kepentingan-kepentingannya. Dalam penyusunan tersebut, sikap seorang aktor dapat berubah sesuai dengan kondisi di tahap domestik, regional, maupun internasional. Dua presiden Republik Filipina, Benigno Aquino III dan Rodrigo Duterte adalah subjek yang akan dibahas pada penelitian ini. Kedua presiden ini dihadapkan pada masalah yang sama, yakni Tiongkok dan Laut Tiongkok Selatan. Tiongkok ingin mengklaim wilayah di Laut Tiongkok Selatan berdasarkan *nine-dash line* nya di perairan Filipina, dimana hal tersebut mengundang reaksi dari kedua presiden.

Guna mengkaji hal ini, penulis memakai perspektif *National Security Policy* atau Kebijakan Keamanan Nasional oleh Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi. Penulis juga menggunakan data-data literatur tambahan untuk mengkaji dan menganalisa data yang sesuai dan benar.

Kata kunci : Filipina, Tiongkok, Aquino, Duterte, Perbandingan, Kebijakan, Keamanan.

## *Abstract*

Name : Dominico Savio Nugroho Agung Pratama

NPM : 2012330200

Title : *Policy Comparison between Benigno Aquino III and Rodrigo Duterte in Managing China and South China Sea Issue*

---

*Nations is the highest and most vital actor in matter of deciding a ruling and creating a policy. In the matter of forging a policy, the nation's leader or the president, needs to make a good consideration which will push their interests. Building those policy, the state of an actor can change due to conditions around domestic, regional, and international stages. Two of Republic of the Philippines presidents, Benigno Aquino III and Rodrigo Duterte are the subject that will be discussed in this paper. Both of the presidents are facing the same problem, the China and the South China Sea. China wants to claim the territory on the South China Sea based on their nine-dash line over the Philippines water, thus calling responses to both presidents.*

*In order to analyze the case, writer will be using Kebijakan Keamanan Nasional or National Security Policy by Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi. Writer will also use some additional literatures to rightfully study and analyze the case.*

*Keywords : Philippines, China, Aquino, Duterte, Comparison, Policy, Security.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus atas rahmat-Nya yang luar biasa, berkah, dan perlindungan-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini dengan judul “Perbandingan Kebijakan Benigno Aquino III dan Rodrigo Duterte dalam Menangani Isu Tiongkok dan Laut Tiongkok Selatan.” Penulis mengucapkan terimakasih kepada Idil Syawfi, S. IP., M.Si selaku dosen pembimbing yang senantiasa bersabar dalam membimbing, memberikan arahan dan petunjuk, serta masukan-masukan dalam penyusunan penelitian ini.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai syarat kelulusan penulis dalam menempuh studi S1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat membantu memberikan masukan dalam pengembangan studi Hubungan Internasional, yang terutama mengenai hal kajian strategis. Penulis menyadari dengan sangat, bahwasanya penelitian ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu, kritik dan saran sangatlah diharapkan demi membantu perbaikan tulisan ini.

Bandung, 29 Juli 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	4
1.2.1. Pembatasan Masalah .....	4
1.2.2. Perumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	6
1.4. Kajian Literatur .....	7
1.5. Kerangka Pemikiran .....	8
1.6. Metoda Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data .....	11
1.7. Sistematika Pembahasan .....	11
BAB II KEBIJAKAN KEDUA PRESIDEN TERHADAP MASALAH LAUT TIONGKOK SELATAN .....	12
2.1. Persamaan antara kedua Presiden .....	12
2.2. Benigno Aquino III semasa pemerintahannya terhadap Tiongkok dan Laut Tiongkok Selatan .....	12
2.3. Rodrigo Duterte semasa pemerintahannya terhadap Tiongkok dan Laut Tiongkok Selatan .....	18



<b>BAB III ANALISA PERBANDINGAN KEBIJAKAN ANTARA AQUINO DAN DUTERTE DENGAN KEBIJAKAN KEAMANAN NASIONAL VIOTTI-KAUPPI.....</b>	<b>24</b>
<b>3.1. <i>Interest</i> atau Kepentingan .....</b>	<b>24</b>
<b>3.2. <i>Objectives</i> atau Tujuan.....</b>	<b>27</b>
<b>3.3. <i>Threats</i> atau Ancaman .....</b>	<b>28</b>
<b>3.4. <i>Opportunities</i> atau Kesempatan .....</b>	<b>29</b>
<b>3.5. <i>Capabilities</i> atau Kapabilitas/Kemampuan .....</b>	<b>29</b>
<b>3.6. Tabel Perbandingan Kebijakan Kedua Presiden .....</b>	<b>31</b>
<b>BAB IV KESIMPULAN .....</b>	<b>34</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>36</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang ada pada Laut Tiongkok Selatan (LTS), telah memberikan ‘*mutual problem*’ pada negara-negara yang ada di sekitarnya, salah satunya Filipina. Hal ini pun memancing perhatian dunia. Pada tahun 2013, tepatnya tanggal 22 Januari, pemerintahan Filipina di bawah Benigno Aquino III melaksanakan arbitrase di bawah *Article 287* dan *Annex VII United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* terhadap perseteruan Filipina dengan Tiongkok terkait Pulau Spratly yang terdapat di Laut Tiongkok Selatan<sup>1</sup>, satu tahun setelah Filipina tidak dapat menghalau kapal Tiongkok yang secara ilegal menangkap ikan di *Scarborough Shoal* yang merupakan wilayah maritimnya pada tahun 2012.<sup>2</sup>

Pada tahun selanjutnya, tahun 2014 Tiongkok melakukan reklamasi terhadap pulau Spratly tersebut begitu pula dengan pulau Paracel. Reklamasi ini ditujukan untuk perluasan fasilitas landasan pacu pesawat udaranya.<sup>3</sup> Tindakan ini semakin menegangkan situasi pada daerah tersebut, termasuk mengundang reaksi pihak-pihak luar daerah Laut Tiongkok Selatan seperti Amerika Serikat-sekutu

---

<sup>1</sup> Feng Zhang, *Assessing China's response to the South China Sea arbitration ruling*, 28 Feb 2017, Australian Journal of International Affairs, hal. 440.

<sup>2</sup> Mincai Yu, *The South China Sea dispute and the Philippines Arbitration Tribunal: China's policy options*, 12 Apr 2016, Australian Journal of International Affairs.

<sup>3</sup> Anthony H. Cordesman and Steven Colley, *Chinese Strategy and Military Modernization in 2015: A Comparative Analysis. A Report of the CSIS Burke Chair in Strategy*, hal. 166-170.

militer Filipina sejak 1951 (Vicedo, 2018)-dan Jepang, Vietnam.<sup>4</sup> Hal ini mengundang reaksi amarah Filipina yang notabeneanya memiliki hak untuk pulau Spratly dikarenakan masuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)-nya.<sup>5</sup>

Dalam menghadapi hal tersebut, Filipina dibawah pemerintahan Aquino, menyetarakan Tiongkok layaknya ‘Nazi Jerman’ secara berulang-ulang, memperkuat segi pertahanan militer dengan bekerja sama dengan aliansi-aliansi lama mereka seperti Amerika dan Jepang.<sup>6</sup> Diperkirakan, Filipina telah mengeluarkan dana sebesar 60 milyar Peso guna melakukan modernisasi militer sejak 2010 silam.<sup>7</sup> Dengan begitu, Aquino menciptakan atmosfer bahwa Tiongkok adalah masalah yang harus diberi perhatian lebih, baik dengan arbitrase seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, namun juga penguatan ketahanan militer bagi wilayah Filipina.

Selanjutnya, Den Haag memenangkan kasus arbitrase ini bagi Filipina pada tanggal 12 Juli 2016.<sup>8</sup> Kemenangan Filipina ini terlihat seperti kemenangan sebuah institusi internasional (baca: UNCLOS) atas negara yang ‘lemah’ tanpa dukungan pertahanan lainnya melawan negara ‘adidaya’.<sup>9</sup> Sehingga pihak Manila lebih pada posisi yang terkesan menguntungkan.

---

<sup>4</sup> Tempo, *Cina Akui Hak Indonesia atas Kepulauan Natuna*, 21 Nov 2015, <https://dunia.tempo.co/read/720925/cina-akui-hak-indonesia-atas-kepulauan-natuna>, diakses pada 1 Okt 2018.

<sup>5</sup> *Ibid.*, Zhang, hal.2.

<sup>6</sup> Richard Javad Heydarian, *Tragedy of Small Power Politics: Duterte and the Shifting Sands of Philippine Foreign Policy*, 4 Agt 2017, Asian Security, hal. 2.

<sup>7</sup> Carmella Fonbuena, *Aquino and the PH Military: Toys for the Big Boys*, 28 Jun 2016, <https://www.rappler.com/nation/137691-aquino-military-modernization>, diakses pada 4 Okt 2018.

<sup>8</sup> Suisheng Zhao, *China and the South China Sea Arbitration: Geopolitics Versus International Law*, 21 Agt 2017, Journal of Contemporary China, hal. 1.

<sup>9</sup> Jane Chan dan Joseph Chinyong Liow, *The South China Sea disputes, the PCA ruling and ASEAN: a call for unity*, RSIS Commentary no. 177, (14 July 2016), <https://www.rsis.edu.sg/rsis->

Namun, pihak Tiongkok menganggap kemenangan Filipina ini sebagai tak lebih dari ‘sebuah kertas’.<sup>10</sup> Tiongkok tetap menguatkan sektor militernya dan menghalau terjadinya diplomasi. Di atas kertas, Filipina memang memenangkan arbitrase tersebut secara politik, akan tetapi, perairan, karang, dan bebatuan yang ada di sana masih sangat dalam pengaruh Tiongkok.<sup>11</sup>

Setelah sepak terjang Filipina dalam mempertahankan wilayahnya selama kepemimpinan Aquino, dilantiklah penerus kursi presidensial Manila, Rodrigo Duterte, yang memenangkan pemilihan presiden pada tanggal 9 Mei 2016.<sup>12</sup> Wajah baru di Filipina ini, mendatangkan angin baru dalam kebijakan luar negeri Filipina. Era presiden Duterte dimulai ketika ia telah menginjakkan kaki di kantor kepresidenan pada tanggal 30 Juni 2016.<sup>13</sup> Lalu, dalam beberapa bulan setelahnya, *policy* Filipina seolah bertolak dari yang sebelumnya menggalakkan militerisasi dan pengamanan wilayah perairannya menjadi menggalakkan pembasmian terhadap obat-obatan terlarang juga penggunanya. “*Go ahead and kill*” *drug addicts*, perintah Duterte pada bulan Juli 2016.<sup>14</sup> Hal ini merupakan tanda beralihnya dimulainya rezim Duterte dalam “*war on drugs*” dan berubahnya strategi dan kebijakan Filipina.

---

[publication/rsis/co16177-the-pca-ruling-and-asean-a-call-for-unity/#.W7XIEvZuLIV](https://www.reuters.com/article/asia-philippines/philippines-ruling-party-calls-for-unity-idUSKCN177000120181004), diakses pada 4 Okt 2018.

<sup>10</sup> *Ibid.*, Zhao, hal. 1.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> CNN Philippine Staff, *Official Count : Duterte is new president, Robredo is vice president*, 30 Mei 2016, <http://cnnphilippines.com/news/2016/05/27/official-count-duterte-president-robredo-yp.html>, diakses pada 8 Okt 2018.

<sup>13</sup> Dharel Placido, *Duterte to hold inaugural at Palace's Rizal hall*, <https://news.abs-cbn.com/focus/06/15/16/duterte-to-hold-inaugural-at-palaces-rizal-hall>, 16 Juni 2016, diakses pada 10 Juli 2019.

<sup>14</sup> Will Worley, *Philippines president Rodrigo Duterte tells people to 'go ahead and kill' drug addicts*, 3 Jul 2016, <https://www.independent.co.uk/news/world/asia/philippines-president-rodrigo-duterte-tells-people-to-go-ahead-and-kill-drug-addicts-a7116456.html>, diakses pada 9 Okt 2018.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Filipina pada masa pemerintahan Benigno Aquino III, memfokuskan pada pertahanan militer yang terus menerus dimodernisasi semenjak beliau duduk di kursi kepresidenan. Telah disampaikan sebelumnya, bahwa Aquino menilai isu wilayah perairan di LTS harus diselesaikan dengan kepentingan mengamankan wilayah perairan tersebut. Aquino mengklaim, dan tentu saja benar adanya, bahwa wilayah perairan di sekitar pulau Spratly masih berada dalam ZEE milik Filipina, dan patut untuk diperjuangkan.

Namun, pada tahun 2016, ber-latarbelakang seorang walikota dari kota Davao, yang dikenal sebagai kota yang “*chaos*”, Filipina menunjukkan wajah yang berbeda semenjak Rodrigo Duterte menduduki kursi kepresidenan, memerangi obat-obatan terlarang dan penggunaanya membuat Filipina seolah berubah hampir 180 derajat. Pasalnya, Duterte lebih mengedepankan persoalan perdagangan obat-obatan terlarang, komunis Mindanao, dan *Moro Islamist insurgencies*, daripada Tiongkok yang terus menerus menekan hak maritim Filipina, sebagai ancaman terbesar bagi Filipina.<sup>15</sup> Perubahan inilah yang akan menjadi sorotan penulis.

### **1.2.1. Pembatasan Masalah**

Terkait dengan terbatasnya waktu dan sumber daya yang penulis miliki, sehingga perlu sekali karya tulis ini dibatasi berkenaan dengan pembahasan

---

<sup>15</sup> *The Philippines : Duterte's wilful start*, Strategic Comments, 24 Okt 2016, hal. 2.

topiknya, juga dengan tujuan mempermudah pemahaman tentang hal-hal yang ditulis. Sebelum berangkat lebih lanjut, penyebutan istilah “Tiongkok” telah mengikuti ejaan yang disahkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014. Selanjutnya, penulis memilih kurun waktu tahun 2010 yakni pada saat Filipina dibawah pemerintahan Aquino, yang selanjutnya pada 2013 menjalankan arbitrase terhadap Tiongkok dibawah Artikel 287 dan *Annex VII UNCLOS*,<sup>16</sup> hingga pemenangan arbitrase tersebut terhadap Filipina pada tahun 2016 seperti yang telah disebutkan, dan pemerintahan Duterte sejak 2016 hingga 2018.

Alasan bagi penulis untuk memilih kurun waktu tersebut, dikarenakan puncak permasalahan Filipina pada pemerintahan Aquino yang diatasi dengan strategi penguatan sisi militer Filipina, modernisasi militer, yang dilanjutkan dengan metode hukum dengan membawa kedua belah pihak yakni menuju arbitrase, berubah sedemikian rupa ketika Duterte meneruskan kursi kepresidenan Manila setelah 6 tahun masa kepemimpinannya.<sup>17</sup> Duterte mempercayai bahwa permasalahan yang sangat serius yang dihadapi oleh Filipina adalah permasalahan dalam negaranya, bukan permasalahan luar negaranya. Duterte justru terlihat memperbaiki hubungan bilateral Filipina-Tiongkok dan ‘mengesampingkan’ aliansi tertuanya yakni Amerika Serikat. Perbedaan strategi dan kebijakan dari Benigno Aquino III dan Rodrigo Duterte ini menjadi hal yang menarik untuk dibahas lebih lanjut. Sehingga demikianlah batasan-batasan masalah dalam penelitian ini.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, Zhang, hal. 1.

<sup>17</sup> *Ibid*, Heydarian, hal. 2.

### 1.2.2. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dituliskan, perilaku Aquino dan Duterte yang terlihat jelas berbeda, menimbulkan pertanyaan yang kiranya dapat dan relevan untuk diteliti, yaitu, “Bagaimana perbandingan strategi dan kebijakan antara Benigno Aquino III dan Rodrigo Duterte dalam menghadapi Tiongkok dan isu Laut Tiongkok Selatan?”

### 1.3. **Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan strategi dan kebijakan antara dua presiden Filipina yakni Benigno Aquino III dan Rodrigo Duterte dalam menghadapi isu Laut Tiongkok Selatan. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah, ada beberapa, antara lain untuk peneliti sendiri, untuk kaum akademisi, juga untuk masyarakat umum. Untuk peneliti, penelitian ini bertujuan sebagai syarat kelulusan dalam menempuh Strata 1 atau S1 pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Untuk kaum akademisi, khususnya bagi pelajar Ilmu Hubungan Internasional dapat membantu memberikan ilmu tambahan dalam studi Hubungan Internasional dalam segi kajian strategis. Dan untuk masyarakat umum, penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan gambaran lebih terkait berubahnya pandangan Filipina terhadap Laut Tiongkok Selatan.

#### 1.4. Kajian Literatur

Menurut Richard Javad Heydarian, politik domestik memainkan peran penting dalam perubahan dramatis dalam kebijakan Filipina terhadap Amerika Serikat dan Tiongkok. Pada masa pemerintahan Arroyo, beliau mengurangi dependensi terhadap AS dan menguatkan relasi dengan Tiongkok, sedangkan pada masa pemerintahan Aquino justru menguatkan relasi dengan AS dalam menghadapi ancaman Tiongkok. Lalu pada masa pemerintahan Duterte, beliau mengekspresikan untuk memisahkan diri dari Amerika Serikat dan mendekati diri dengan Tiongkok untuk mengejar kebijakan luar negeri yang “mandiri”.<sup>18</sup>

Dalam bukunya, Viotti-Kauppi menerangkan sebuah kerangka tentang kebijakan keamanan nasional. Hal tersebut sangatlah penting dengan dua alasan, yakni : (1) Pembuat kebijakan secara eksplisit maupun implisit berpikir tentang kepentingan, tujuan, ancaman, dan kesempatan ketika membentuk dan mengimplementasikan kebijakan mereka; dan (2) kerangka ini memiliki kegunaan tak hanya untuk pembuat kebijakan bagi negara, tetapi juga untuk para praktisi di organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan lembaga swadaya masyarakat transnasional.<sup>19</sup>

Kedua hal di atas, apabila dikaitkan dengan sikap dan kebijakan para aktor yang dalam hal ini adalah Presiden Benigno Aquino III dan Rodrigo Duterte, dalam menghadapi sebuah isu tertentu, perlu adanya kesadaran akan kepentingan, tujuan, ancaman, dan kesempatan yang hadir di waktu tertentu

---

<sup>18</sup> *Ibid*, Heydarian, hal. 1.

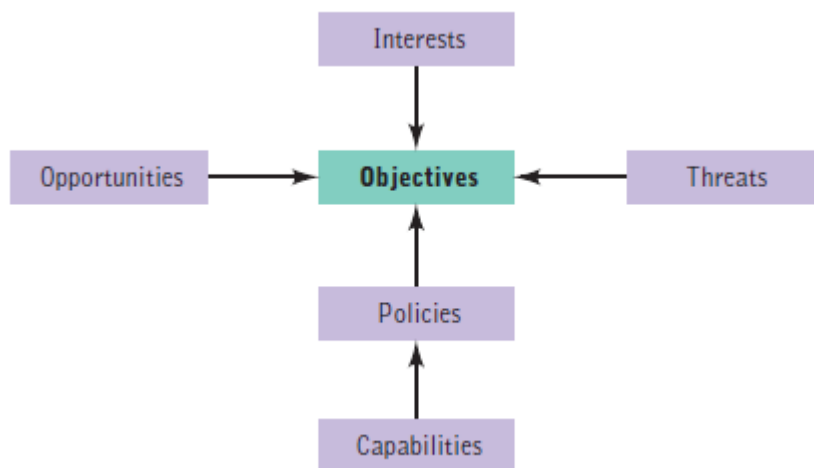
<sup>19</sup> Paul R. Viotti, Mark V. Kauppi, *International Relations and World Politics* (New Jersey : Person Education, 2013), hal. 186.



sehingga dalam membuat kebijakan luar negeri dapat menghasilkan kebijakan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan negerinya yakni Filipina.

### 1.5. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan sudut pandang dari Viotti-Kauppi mengenai *National Security Policy* (Kebijakan Keamanan Nasional). Dalam bukunya yakni *International Relations and World Politics*, bab 6 : *Power*, sub bab 6.1 : *Understanding State Behavior* (Memahami Perilaku Negara).<sup>20</sup>



*Understanding State Behavior* oleh Viotti-Kauppi

Untuk memahami sikap sebuah negara, menurut Viotti-Kauppi seperti gambar di atas, terdapat 5 poin pokok, yakni :

- ◆ *Interest* (Kepentingan)

Sebagai alat retorikal untuk membenarkan sebuah kebijakan yang kontroversial. Pada bagian ini ada 3 poin yang menjelaskan *interest* yakni :

---

<sup>20</sup> *Ibid*, Viotti-Kauppi, hal. 187-209.

- a. *Survival (vital interest)* – ketahanan (kepentingan yang vital): yakni pelaksanaan dan pemeliharaan yurisdiksi, kekuatan, otoritas internal maupun eksternal (dalam teritorinya dan luar negeri)
- b. *Economic vitality* (vitalitas ekonomi) : kesejahteraan ekonomi tak hanya dilihat dalam tatanan masyarakat namun juga sebagai kekuatan dalam tatanan internasional.
- c. *Core values* (nilai-nilai inti) : identitas nasional, seperti *democratic values* (nilai-nilai demokrasi) dan *human rights* (hak asasi manusia).

- *Objectives (Tujuan)*

Tujuan-tujuan spesifik sebuah negara, organisasi internasional, dan organisasi transnasional. Pada praktiknya, tujuan ini biasanya lebih sederhana sifatnya dibandingkan seperti pertahanan terhadap invasi atau melakukan invasi (misal mengurangi kemungkinan perang, membantu negara-negara berkembang, peduli terhadap lingkungan dunia – Amerika Serikat, Kanada, Jepang, dll., secara jangka panjang ; menstabilkan kerusuhan di Afghanistan, secara jangka pendek).

- *Threats (Ancaman)*

Sejauh apakah *threats* atau ancamannya? Tujuan sebuah negara dapat dipengaruhi oleh ancaman-ancaman dari global. Beberapa analis menaksir ancaman semata dari intensinya saja, ada pula yang lain memfokuskan pada kapabilitasnya saja. Viotti-Kauppi menyederhanakan pemahaman akan ancaman dari para analis dengan formula : *Intentions x*

*Capabilities = Threat*. Sebuah negara yang mempunyai kapabilitas menginvasi negara lain, namun tidak memiliki intensi untuk melakukannya, maka ancaman negara tersebut dapat dibilang tidak ada.

Kemudian, ancaman membentuk perilaku sosial – pemahaman yang hanya dipegang oleh yang berkuasa dan pemahaman tersebut dianut pula bagi yang mengikutinya. Maka, menelaah mana yang mengancam dan tidak mengancam menjadi sangat subjektif. Sehingga formulanya menjadi : *Perceived Intentions x Perceived Capabilities = Threat Perception*.

- *Opportunities* (Kesempatan)

Layaknya *threats*, *opportunities* juga termasuk sangatlah subjektif. Lebih lanjut lagi, pengambilan suatu kesempatan bagi suatu negara, dapat diartikan sebagai ancaman oleh negara yang lain.

- *Capabilities* (kapabilitas)

Hal terakhir dalam kerangka kerja pembuatan sebuah kebijakan. Sebaik apapun pemikiran yang dibuat guna mengejar sebuah tujuan, tidak akan tercapai apabila kapabilitas dan kekuatan sebuah negara tidak mendukung untuk terjadi. Ada beberapa cabang dalam meninjau kapabilitas, yakni kapabilitas politik, kapabilitas sosial-budaya, kapabilitas ekonomi-geografi, dan kapabilitas militer.

## **1.6. Metoda Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah kajian atau studi kepustakaan. Penulis mencari sumber-sumber informasi dari antara lain : buku, jurnal ilmiah, berita, pernyataan-pernyataan resmi, laporan-laporan resmi baik dari pemerintah maupun non-pemerintah, dan media massa elektronik.

## **1.7. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini terdiri dari 4 bab, dan di dalam bab tertentu akan terdapat beberapa sub bab guna mengerucutkan penjelasan penulis. Pada Bab I Pendahuluan, terdiri atas sub bab : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Literatur, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data, serta Sistematika Pembahasan.

Pada Bab II akan memaparkan data-data tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Presiden Benigno Aquino III dan Presiden Rodrigo Duterte dalam menangani masalah terkait dengan Tiongkok dan Laut Tiongkok Selatan.

Pada Bab III akan memaparkan 5 poin dari buku Viotti-Kauppi yang dikaitkan dengan kasus masing-masing presiden terhadap Tiongkok dan LTS, dan bagaimana 5 poin tersebut menunjukkan perbedaan kebijakan daripada masing-masing presiden pada masa pemerintahannya.

Pada Bab IV adalah bab kesimpulan, dimana penulis akan mencoba menganalisis, merangkum, dan pada akhirnya menjawab pertanyaan penelitian dengan analisa yang baik.